

**POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA
DI SULAWESI SELATAN**



MUH. AZHRIEL WAHYU

E041181507



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA
DI SULAWESI SELATAN**

MUH. AZHRIEL WAHYU

E041181507



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA
DI SULAWESI SELATAN**

MUH. AZHRIEL WAHYU
E041181507

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA
DI SULAWESI SELATAN**

MUH. AZHRIEL WAHYU

E041181507

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 1
bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA
DI SULAWESI SELATAN

MUH. AZHRIEL WAHYU

E041181507

Dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

PANITIA UJIAN

Ketua : **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

(.....)

Anggota : **Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si.**

(.....)

Anggota : **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**

(.....)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Posisi Ideologi Politik Partai Gelora Di Sulawesi Selatan" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



MUH. AZHRIEL WAHYU

E041181507

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. selaku pembimbing dan kepada Alm. Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D yang semasa hidupnya juga menjadi pembimbing sekaligus bapak bagi penulis di kampus. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Kepada ayah tercinta Wahyu Napeng, S.E. dan ibu tercinta Widya Harjuita M., S.E. saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana serta para dosen Departemen Ilmu Politik.

Akhirnya, penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Muh. Azwin Wahyu, Muh. Adhil Anugrah Wahyu, Dr. Sri Dewi, Apt. Andi Sry Hardiyanti S.Farm., IPMIL Komisariat Kamanre, IPMIL RAYA UNHAS, Angkatan 08 IPMIL RAYA UNHAS, HMI Komisariat Isipol UNHAS, Politik 2018, serta Lingkarsen18 yaitu Uga, Eko, Arung, Garege, Aan, atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis,

MUH. AZHRIEL WAHYU

ABSTRAK

MUH. AZHRIEL WAHYU. **Posisi Ideologi Politik Partai Gelora Di Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Gustiana A. Kambo).

Latar belakang. Partai Gelora adalah sebuah partai politik yang baru didirikan tahun 2020 dan sebagian besar anggotanya sebelumnya adalah kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai Gelora memposisikan dirinya sebagai partai nasionalis. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kader Partai Gelora yang berasal dari PKS membangun partai baru yang memiliki ideologi berbeda. **Metode.** Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gelora sebagai partai baru menawarkan hal yang berbeda dimana Partai Gelora memposisikan dirinya sebagai partai tengah yang mengedepankan nasionalisme dan membawa ide besar yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan lima besar di dunia. Dengan mengambil posisi ideologi tengah, akan semakin luas jangkauan pemilih yang ingin diraih oleh Partai Gelora pada Pemilu 2024, karena tidak dibatasi segmentasi pemilih pada satu kelompok tertentu melainkan semua kelompok. Partai Gelora lebih mengutamakan bagaimana menjangkau basis pemilih sebanyak mungkin dan seluas-luasnya dari berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan akun media sosial seperti Instagram. Media sosial menjadi sarana bagi Partai Gelora untuk mempromosikan partainya agar dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Partai Gelora sebagai partai baru berusaha melakukan rekrutmen politik dengan modern. Rekrutmen dilaksanakan dengan menyediakan aplikasi yang dapat didownload kemudian pengguna bisa langsung melakukan registrasi dan terdaftar sebagai anggota Partai Gelora. **Kesimpulan.** Upaya kader Partai Gelora dalam membangun partainya belum memberikan hasil yang efektif di Sulawesi Selatan karena hanya mampu memperoleh kursi di tingkat kabupaten/kota dan gagal di tingkat provinsi dan DPR RI.

Kata Kunci : ideologi; partai tengah; rekrutmen terbuka

ABSTRACT

MUH. AZHRIEL REVELATION. **Position of the Political Ideology of the Gelora Party in South Sulawesi** (supervised by Gustiana A. Kambo).

Background. The Gelora Party is a political party that was only founded in 2020 and most of its members were previously cadres from the Prosperous Justice Party. The Gelora Party positions itself as a nationalist party. **Aims.** This research aims to identify how Gelora Party cadres from PKS build a new party that has a different ideology. **Method.** The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection was carried out through interviews and documentation. **Results.** The results of this research show that the Gelora Party as a new party offers something different, where the Gelora Party positions itself as a middle party that prioritizes nationalism and carries a big idea, namely making Indonesia a new superpower country, the top five powers in the world. By taking a middle ideological position, the reach of voters that the Gelora Party wants to reach in the 2024 elections will be wider, because it is not limited to voter segmentation in one particular group but rather all groups. The Gelora Party prioritizes how to attract as many voter bases as possible and as wide as possible from various levels of society. This socialization is carried out using social media accounts such as Instagram. Social media is a means for the Gelora Party to promote its party so that it is chosen by the public in elections. The Gelora Party as a new party is trying to carry out modern political recruitment. Recruitment is carried out by providing an application that can be downloaded and then users can immediately register and be registered as members of the Gelora Party. **Conclusion.** The efforts of Gelora Party cadres to build their party have not provided effective results in South Sulawesi because they were only able to obtain seats at the district/city level and failed at the provincial and DPR RI levels.

Keywords: ideology; center party; open recruitment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Ideologi Politik.....	7
2.1.1. Pengertian Ideologi Politik	7
2.1.2. Positioning Ideologi Partai Politik	8
2.2. Partai Politik.....	10
2.2.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik	10
2.2.2. Jenis-Jenis Partai Politik.....	14
2.3. Penelitian Terdahulu.....	17
2.4. Kerangka Berpikir.....	18
2.5. Skema Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Tipe dan Jenis Penelitian.....	21
3.2. Objek Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data	21
3.4. Teknik Pengumpulan Data	22
3.5. Informan Penelitian	23
3.6. Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1. Profil Partai Gelora	25
4.2. Perolehan Suara Partai Gelora pada Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan...	27
4.3. Partai Gelora Memposisikan Diri Sebagai Partai Tengah	27
4.4. Memperluas Basis Pemilih Melalui Media Sosial dan Melakukan Rekrutmen Terbuka.....	29
BAB V PENUTUP	32
5.1. Kesimpulan	32
5.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ideologi bagi partai politik adalah pembawa ide. Urgensi ideologi bagi partai berangkat dari basis dasar terbentuknya yang merupakan bentuk pengorganisasian orang-orang dengan kesamaan ide. Seperti didefinisikan Edmund Burke, Partai politik adalah *a body of man united, for promoting for the joint endeavours the national interest, upon some articular principle in which they are all agreed*.¹ Dengan demikian, masing-masing parpol akan memiliki basis dasar kebijakan untuk mengelola kebijakan publik, dan basis dasar inilah yang akan dinegosiasikan dalam proses kebijakan.

Di Indonesia, parpol cenderung meletakkan basis eksistensinya pada pengelompokan sosial dan politik aliran daripada klasterisasi ideologis.² Melihat proses politik yang berkembang selama ini, kita dihadapkan pada semangat pragmatisme yang dianut mayoritas parpol di Indonesia. Kondisi ini tentu saja hampir serupa dengan kondisi menjelang pemilu tahun 1999. Partai politik berkompetisi dan diberikan kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya dan pemilih tidak lagi diintimidasi dalam menentukan partai pilihannya.

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewedahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai. Ini merupakan sebuah fenomena menarik, ketika partai berbasis religius (Islam) dan merupakan partai doktriner, semakin mendekati diri dan terbuka pada partai berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis.³

Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern

¹ Wilcox, Fransesca Vassalo & Clyde. 2006. Part is a carrier of Ideas. London: Sage Publications. Hal. 79

² Bariroh, Laili. 2014. Positioning Ideologi Partai Politik Pada Preferensi Politik Santri. Jurnal Review Politik, 4(1). Hal. 134

³ Simbolon, Parakritri T. 2006. Menjadi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 48

berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik.

Banyak partai politik dimotivasi oleh tujuan ideologis. Pemilihan demokratis umumnya menampilkan persaingan antara partai-partai berhaluan liberal, konservatif, dan sosialis, ideologi umum lainnya dari partai politik yang sangat besar termasuk komunisme, populisme, dan nasionalisme. Partai politik di berbagai negara akan sering mengadopsi warna dan simbol yang sama untuk mengidentifikasi diri mereka dengan ideologi tertentu. Namun, banyak partai politik tidak memiliki afiliasi ideologis dan malah mungkin hanya terlibat dalam patronase, klientelisme, kronisme, atau kepentingan pengusaha politik tertentu. Dalam sistem demokrasi, ideologi akan di-*breakdown* dalam manifesto partai dan program partai akan menjadi sikap dasar partai dalam menjalankan proses pengelolaan kebijakan negara.⁴

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (disingkat Partai Gelora Indonesia) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019. Partai ini didirikan oleh 99 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Partai ini dideklarasikan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta, 10 November 2019. Setelah melewati proses pendaftaran dan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, Partai Gelora sah menjadi badan hukum dengan penyerahan SK Menteri Hukum dan HAM pada 2 Juni 2020. Partai Gelora adalah pecahan dari PKS, sebab sejumlah mantan politikus PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Anis Matta mengakui bahwa Partai Gelora terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera. Anis mengatakan dirinya sudah mengembangkan narasi keterbukaan partai sejak saat masih menjabat Sekjen maupun Presiden PKS. Narasi keterbukaan itu diakuinya kini juga dibawa ke lingkup internal Partai Gelora.

Partai Keadilan Sejahtera diisukan memiliki dua faksi dalam partainya, yaitu faksi Keadilan dan faksi Sejahtera. Faksi keadilan ini ialah faksi yang identik dengan senior-senior di PKS. Seperti misalnya Pendiri PKS (alm) Yusuf Supendi, Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid (HNW), Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS, Sohibul Iman. Faksi ini, kerap dilekatkan dengan

⁴ Sugiono, Muhadi. 2009. Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009. Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas Pemilu 2009. Yogyakarta: UGM. Hal. 3

bagian PKS yang konservatif. Faksi keadilan ini lekat dengan mereka yang masih menjunjung tinggi semangat PKS tetap seperti era Partai Keadilan dahulu. Nama yang kerap disebut publik untuk kelompok ini diwakili representasi Hidayat Nurwahid. Sementara itu, faksi sejahtera ialah faksi yang identik dengan para pengurus muda. Yakni seperti mantan Presiden PKS Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfud Shiddiq. Kelompok ini kerap dianggap sebagai bagian PKS yang demokratis dan lebih cenderung moderat. Kelompok yang diisukan sebagai faksi Sejahtera inilah yang kemudian membentuk Partai Gelora.

Anis Matta dan Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah pernah terlibat konflik di internal PKS. Konflik mencapai puncaknya ketika PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dan loyalis Anis Matta dari seluruh jenjang di PKS. Pengurus di daerah yang dikenal loyalis Anis Matta juga dipecat, seperti pimpinan DPW PKS di beberapa provinsi. Fahri Hamzah saat itu masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pemecatan itu disebabkan karena DPP PKS menganggap bahwa Fahri Hamzah memiliki 10 'dosa', salah satunya mendukung Setya Novanto yang waktu itu ditangkap karena kasus korupsi dan juga kritik Fahri Hamzah kepada KPK. Fahri Hamzah mengatakan ada persekongkolan antara seluruh petinggi PKS untuk menyingkirkan dia sehingga dirinya pun menggugat ke pengadilan. Gugatan ini berhasil dimenangkan oleh Fahri Hamzah sehingga meskipun telah dipecat oleh PKS, dia tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan PKS harus membayar ganti rugi sebesar 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Fahri Hamzah bersama Anis Matta kemudian mendirikan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), sebuah organisasi yang menjad cikal bakal berdirinya Partai Gelora.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Sidik, yang juga adalah mantan kader PKS, mengatakan partainya memiliki kesamaan dengan PKS yang sebelumnya menjadi rumah bagi para kader mereka. Sebab, sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Namun, Mahfudz mengatakan tetap ada perbedaan antara PKS dan Gelora, yaitu Partai Gelora ini adalah PKS yang lebih "meng-Indonesia".

Mahfudz Sidik mengatakan meskipun sebagian besar kader Gelora dulunya kader PKS, Partai Gelora mengusung asas Pancasila berlandaskan UUD 1945, bukan Islam. Partai Gelora menyadari umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam perpolitikan Indonesia. Kendati demikian, Partai Gelora tetap berupaya tampil sebagai partai yang juga berjiwa nasionalis. Partai Gelora dalam AD/ART mencantumkan bahwa Jati diri Partai Gelora adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyatakan bahwa Partai Gelora akan menjadi partai yang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Partai Gelora akan membuka diri untuk seluruh komponen masyarakat. Karena itulah Partai Gelora disebutkan tidak ingin menyasar target pemilih dari golongan tertentu. Selain itu, Partai Gelora juga menginginkan menjadi partai politik yang dapat memperjuangkan Indonesia menjadi negara 5 besar dunia.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan oleh partai politik untuk memenangkan pemilu. Pada Pemilu 2019 misalnya, PKS menduduki peringkat ke-5 di Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi perhatian bagi Partai Gelora Sulawesi Selatan. Partai Gelora Sulawesi Selatan saat ini dipimpin oleh H. Syamsari Kitta, mantan Bupati Takalar 2017-2022 yang dahulu merupakan kader dari PKS. Di Sulawesi Selatan, Sekretaris Partai Gelora Sulsel Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, sebagian besar mantan kader PKS di Sulawesi Selatan bergabung ke Gelora. Adapun kader itu adalah Syamsari Kitta, Asriadi Samad, Jafar Sodding, Taslim Tamang, Andi Abdullah Rahim, dan Mudzakkir Ali Djamil sendiri. Syamsari Kitta merupakan mantan Bupati Takalar periode 2017-2022. Asriadi Samad dan Jafar Sodding merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Perpindahan kader PKS menjadi kader Partai Gelora menunjukkan ada perubahan dalam berpolitik dari partai Islam menjadi partai nasionalis. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun basis pendukung dan bagaimana para mantan tokoh PKS tersebut mempertahankan pendukung dari yang semula memilih partai Islam seperti PKS menjadi partai nasionalis seperti Gelora.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung asas Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Publik juga dapat melihat bahwa kader-kader PKS dikenal berasal dari kalangan Islam yang fundamentalis. Namun, sejumlah kader PKS termasuk di Sulawesi Selatan memutuskan untuk membentuk Partai Gelora yang memilih ideologi nasionalis dalam berpartai. Ideologi politik dijelaskan sebagai suatu paham tertentu yang digunakan untuk melingkupi semua usaha kondisi ideal tertentu. Ideologi disini dihubungkan dengan kekuasaan. Persoalan ideologi bagi partai politik adalah menjadi hal yang sangat krusial, mengingat dengan adanya ideologilah maka partai politik akan dapat memegang teguh janji yang diberikan pada masyarakat.

Partai politik tanpa ideologi layaknya manusia yang tidak memiliki prinsip dalam hidupnya, mudah terombang-ambing dan hanya cenderung melihat keuntungan atas apa yang diberikan, bukan kepada kebahagiaan ketika mampu memberikan sesuatu pada orang lain. Pragmatisme partai politik menjadi semakin

menguat dan inipun menimbulkan kesan bahwa ideologi politik yang dianut oleh suatu partai menjadi hal tidak lagi penting. Perubahan ideologi para kader PKS yang dahulunya memegang asas Islam kemudian berpindah ke Partai Gelora dan menjadi nasionalis menjadi sebuah hal yang menarik. Perpindahan ini juga dilatarbelakangi oleh konflik internal dalam tubuh PKS antara para senior dan tokoh muda PKS saat itu. Menariknya adalah karena PKS selama ini dikenal sebagai partai yang cenderung menjalankan ideologi Islam yang puritan dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. Para kader yang telah lama dikenal bergabung di PKS seperti Anis Matta (mantan Presiden PKS), Fahri Hamzah (mantan Wakil Ketua DPR RI), dan sejumlah tokoh PKS yang utama di Sulawesi Selatan memutuskan untuk membangun Partai Gelora yang berasaskan Pancasila dan dikatakan lebih nasionalis dibandingkan dengan PKS. Dalam memposisikan ideologi partainya, tentu Partai Gelora melakukan cara-cara kepartaian untuk memperkenalkan diri sebagai partai baru yang nasionalis walaupun masyarakat telah lama mengenal sebagian kader Partai Gelora dahulu adalah kader Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“POSISI IDEOLOGI POLITIK PARTAI GELORA DI SULAWESI SELATAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kader Partai Gelora yang berasal dari PKS membangun partai baru yang memiliki ideologi berbeda?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu : Untuk mengidentifikasi bagaimana kader Partai Gelora yang berasal dari PKS membangun partai baru yang memiliki ideologi berbeda.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang partai politik di tingkat lokal maupun nasional.
 - b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang partai politik yang melihat dari posisi ideologi partai

politik dalam membentuk sebuah partai untuk menjawab berbagai fenomena sosial politik yang berkembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai posisi ideologi partai politik sebagai bagian dari permasalahan partai politik saat ini.
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang posisi ideologi partai politik di tengah berkembangnya pragmatisme partai dan bertumbuhnya partai baru.
- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi para partai politik dalam menegaskan posisi ideologi mereka agar mampu menjawab permasalahan bangsa dan menarik pilihan masyarakat dalam memilih partai politik.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai ideologi politik dan partai politik sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama untuk melihat Partai Gelora Sulawesi Selatan dalam membangun basis ideologi yang nasionalis. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambarkan dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaharuan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1. Ideologi Politik

2.1.1. Pengertian Ideologi Politik

Ideologi adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarahkan pada satu tujuan, harapan, dan tindakan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja, dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Ideologi diyakini pertama kali digunakan dalam pengertian modern oleh orang Prancis, De Tracy (1754-1836) dalam kaitannya dengan peran Pencerahan dalam Revolusi Prancis. De Tracy mendefinisikan Ideologi dari kata turunannya yaitu 'ideo' yang berarti 'gagasan' dan 'logos' yang berarti studi atau 'ilmu gagasan' (Baradat, 2006). Ini menyiratkan bahwa ideologi dalam arti aslinya berkonotasi dengan ilmu pengetahuan atau studi tentang ide-ide.

Fulford (2017) melihat ideologi sebagai seperangkat ide yang mengungkapkan template politik yang digunakan politisi untuk menciptakan mereknya serta menguraikan standar yang dia gunakan untuk menarik orang dengan ide serupa untuk mendukungnya. Hartmann (2015) mendefinisikan ideologi dalam kaitannya dengan fungsinya dalam partai politik. Baginya, ideologi berkonotasi dengan program-program yang disajikan partai politik kepada para pemilih, tugas-tugas yang mereka lakukan sebagai organisasi dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan dalam pemerintahan.

Jan (1958) mendefinisikan ideologi sebagai sekumpulan ide atau pendapat yang menjadi dasar, atau diakui sebagai dasar, aktivitas politik individu atau kelompok, dan yang, secara bersama-sama, membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dalam pandangannya, gagasan atau pendapat yang terisolasi atau terpencar-pencar tentang suatu hal tidak mungkin disebut sebagai ideologi. Jan dengan tegas menyatakan bahwa ide-ide yang memiliki arti penting dalam mempengaruhi perilaku politik warga negara secara positif adalah apa yang disebut sebagai ideologi.

Dalam buku *Modern Political: Ideologies and Attitudes (Culture)*, melihat ada 4 (empat) teori mengenai ideologi (dalam Siswono, 005), sebagai berikut:

1. Teori Kepentingan: Bahwa ideologi itu bersifat kejiwaan yang bisa diselidiki dan dijelaskan. Ide yang terbentuk sebagai akibat realitas pada diri manusia. Manusia yang berakal bisa menggunakan reasoning untuk menciptakan hidupnya dengan memanipulasi realitas dunia yang ada di sekitarnya.
2. Teori Kebenaran: Bluhm dalam hal ini mengikuti pandangan filosof wanita Hannah Arendt tentang aktivitas manusia di dunia yang merefleksikan ideologi, yakni untuk menjalankan proses kehidupan. Ideologi kemudian muncul secara rasional dan bebas, yang ingin mewujudkan hakikat "Kebenaran".
3. Teori Kesulitan Sosial: Ideologi lahir dari hal-hal yang tidak disadari, sebagai pola jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul dari masyarakat. Kesulitan tersebut sebagai patologi yang memerlukan obat dan penyembuhan, maka fungsi ideologi adalah remedial atau kuratif.
4. Teori Kesulitan Kultural: Ideologi timbul karena hal-hal yang menyangkut hubungan perasaan dan arti hidup (sentiment and meaning). Kedudukan ideologi sama seperti ilmu pengetahuan teknologi, agama dan filsafat. Akibat selalu ada dislokasi sosial dan kultural dalam kehidupan manusia, maka manusia memerlukan arti hidup yang baru dan segar.

2.1.2. Positioning Ideologi Partai Politik

Ideologi politik dalam partai politik memiliki dua aspek yaitu: ideologi sebagai strategi untuk menarik warga ke partai, sebagai sarana untuk mendekatkan partai kepada warga; dan ideologi partai dalam hal program-program aksi partai politik untuk pemerintahan yang baik. Akibatnya, dalam ideologi partai, partai politik mencoba memikat warga dengan cara mereka mengorganisir diri dan apa yang mereka perjuangkan; dan bagaimana mereka mengusulkan untuk memecahkan masalah negara atau bangsa. Ideologi partai politik tercermin dalam berbagai ranah, baik kebijakan dan perilaku kebijakan, maupun dokumen partai.

Menurut Kotler (1997: 262), positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran

nilai dimana konsumen didalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan, dibandingkan dengan pesaingnya. Saat ini konsep strategi positioning digunakan juga dalam dunia politik dan kepartaian. Strategi positioning tidak bisa dilepaskan dari basis ideologis perjuangan parpolnya. Ideologi parpol merupakan acuan dasar bagi strategi positioning yang akan diterapkan. Dalam praktiknya, ideologi ini kemudian digabungkan dengan informasi yang didapat dari masyarakat luas untuk mendapatkan strategi yang pas.

Dalam membaca fenomena pergeseran positioning ideologi partai-partai politik, hal demikian sudah jauh hari disampaikan oleh Anthony Downs. Downs menyatakan bahwa setiap partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu, memiliki daya mobilitas yang tinggi untuk melakukan pergeseran positioning ideologinya (Noris, 1999:32), contohnya membuat kebijakan dengan menabrak atau mengenyampingkan rambu-rambu ideologi partainya. Hal itu dimotivasi pilihan rasional (*rational choice*) untuk mendapat keuntungan yang besar pada momentum tersebut. Bahkan, partai-partai dapat dengan mudah menempatkan diri di titik manapun dalam kontinum positioning ideologinya, dengan maksud dan tujuan menarik simpati pemilih sebanyak-banyaknya. Partai-partai melakukan hal itu, dikarenakan para elitnya tidak terlalu peduli soal ideologi partai atau bagaimana seharusnya partai yang ideologis itu bertindak. Mereka lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memeroleh keuntungan pribadi dan jangka pendek (Klingemann, 2000:41).

Positioning ideologi partai politik merupakan yang harus dilakukan organisasi politik. Pertama, strategi ini akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu politik dan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu parpol, sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik jelas membantu anggota parpol itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Ketiga, membantu penyusunan strategi dalam approach (pendekatan) ke masyarakat. Keempat, membantu mengarahkan jenis sumber daya politik apa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis melihat upaya yang dibangun oleh Partai Gelora, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, sebagai sebuah partai politik baru dalam memosisikan ideologi partainya yang bersifat nasionalis. Hal ini menjadi menarik karena sebagian besar pendiri dan pengurus Partai Gelora adalah

mantan kader dari Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dikenal sebagai partai Islam fundamentalis di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menggali lebih jauh bagaimana Partai Gelora mampu membangun partai baru yang berbeda ideologinya dengan PKS.

2.2. Partai Politik

2.2.1. Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun materil⁵. Sementara itu, Miriam Budiardjo mengatakan partai politik adalah adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka⁶.

Menurut Pablo Onate, partai politik adalah organisasi yang stabil dan permanen untuk sementara waktu, yang didasarkan pada ideologi dan program pemerintah untuk menentukan tujuan, yang berupaya mencapai tujuan tersebut melalui pelaksanaan kekuasaan politik, dan berusaha untuk menduduki posisi publik⁷. Menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempermosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan

⁵ Friederich, Carl. J. 1967. *Introduction to Political Theory*. New York: Harper & Row. hal. 415

⁶ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 403-404

⁷ Pablo Oñate, dikutip dalam Águila, Rafael del. 2008. *Manual de Ciencia Política*. Madrid: Trotta. hal 251

memiliki kemampuan untuk menmpatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah :

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memrintah dan yang di perintah yaitu menmapung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan apsirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan peda pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemrintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya. Misalnya negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang mengunut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak pemguasa kepada masyarakat.

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan

dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari konsensus.

7. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya diproduksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik. Yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki sistem ideologi yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. Masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik. Misalnya dengan merumuskan AD/ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi antar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktivitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

9. Profesionalisme Partai Politik

Sistem persaingan politik dan control media masa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu dipikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (*sustainable*). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standar dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri.

2.2.2. Jenis-Jenis Partai Politik

Menurut Mufti (2013 : 126-127) secara umum klasifikasi dan sistem kepartaian dapat dibagi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Lalu berdasarkan ideologi kepentingan, partai terbagi atas sebagai berikut :

1. Partai kader, yang sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal.

2. Partai massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada di luar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu,

tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa.

3. Partai diktatorial merupakan subtype dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai.

4. Partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Kebanyakan sistem politik yang muncul di negara berkembang pada dasarnya dalam dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Pertama, sistem politik yang berbentuk demokrasi politik. Model sistem ini dicirikan oleh adanya lembaga-lembaga politik berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang relatif otonom dan independen. Kedua, sistem politik dengan model demokrasi terpimpin. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam eksekutif yang memungkinkan mereka lebih berkuasa dari legislatif. Ketiga, oligarki pembangunan. Sistem ini semula ditujukan untuk mempercepat demokratisasi dan modernisasi. Keempat, sistem politik yang berbentuk oligarki totaliter. Ciri yang menonjol adalah tidak adanya pusat kekuasaan diluar rezim yang berkuasa.

Macridis (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 117) mengajukan tipologi partai politik berdasarkan kriteria sumber dukungan, organisasi internal dan cara tindakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Partai komprehensif, yaitu Partai yang berorientasi pada pengikut (Client Oriented).
2. Partai sektarian, yaitu partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya.
3. Partai tertutup, adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas.
4. Partai terbuka, adalah partai yang kualifikasi keanggotaannya longgar.
5. Partai Diffused, adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

6. Partai Specialized (khusus), adalah partai yang menekankan keperwakilan (Representativeness), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu.

Almond (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015 : 500) membuat klasifikasi berdasarkan tujuan dan orientasi dari partai politik itu sendiri, menjadi empat tipe, yaitu :

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Klasifikasi Partai politik berdasarkan tujuannya menurut Almond (dalam Efriza, 2015 : 401) dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia.

2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.

3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hermanto pada tahun 2019 dalam jurnal berjudul *Positioning Ideologi Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilihan Presiden dimaknai sebagai manifestasi dari model koalisi pencarian jabatan. Karakteristik model koalisi pencari jabatan bersifat cair dan tidak permanen. Presidential threshold 20% mengakibatkan partai politik harus berkoalisi untuk mendukung kandidat pada Pilpres 2019. Koalisi partai politik pada Pilpres 2019 merupakan keharusan bagi partai politik. Munculnya partai catch-all menunjukkan pragmatisme dan pergeseran ideologi partai politik dalam membangun koalisi. Hal ini membuktikan kurangnya komitmen dan melemahnya ideologi partai politik dari waktu ke waktu. Partai politik lebih fokus untuk mendapatkan bagian kekuasaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi tidak dapat dijadikan sebagai preferensi mutlak koalisi partai politik. Karena terbukti komposisi koalisi tidak selalu dibentuk atas dasar ideologi. Hal ini menjelaskan bahwa pembentukan koalisi merupakan basis kepentingan politik yang bersifat non-ideologis atau office-seeking untuk mendapatkan bagian kekuasaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hatta Abdi Muhammad pada tahun 2018 dalam jurnal berjudul *Pembangunan Pelembagaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sebagai Partai Politik Baru Di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Persatuan Indonesia dalam konteks usia partai yang tergolong masih muda, dengan terus bekerja memantapkan nilai pada Partai Persatuan Indonesia kepada publik sangat terus diupayakan. Sosialisasi dan pelaksanaan produk politik partai yang mengorientasikan pada produk politik kesejahteraan diharapkan akan membentuk basis loyal masyarakat kepada partai dan secepat mungkin terbentuk basis-basis massa kongkret. Hal ini didasarkan dalam upaya memiliki kantong-kantong pemilih berdasarkan aspek sosial dan politik yang ditujukan pada kontestasi pemilihan umum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yeby Ma'asan Mayrudin pada tahun 2017 dalam jurnal berjudul *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penulis menemukan tiga bentuk pembilahan partai-partai politik dengan melihat jarak ideologis dan positioning ideologi-nya, yaitu "Kiri" (Nasionalis Sekuler), "Kanan" (Islam) dan "Tengah" (Cacth-all Party). Dalam menghadapi pemilu 2014 ini, partai-partai politik yang berada pada sisi "Kiri" (Nasionalis Sekuler) maupun "Kanan" (Islam) mengalami pergeseran positioning ideologi ke arah tengah. Namun, tidak demikian dengan partai "Tengah" (Cacth-all Party). Pergeseran positioning ideologi partai dapat dibedakan menjadi tiga pola yaitu Pertama, Konservatif yang mempertahankan status quo partainya sebagai partai ideologis. Kedua, Konservatis Progresif melakukan pergeseran, namun tidak begitu ekstrem, masih terhitung moderat, contohnya PKS dan PDI-P. Ketiga, pola Ekstremis, di mana partai melakukan pergeseran positioning ideologi begitu tajam, contohnya PKB, PAN, PBB, PPP, Gerindra dan PKPI.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini memperlihatkan perbedaan dalam mengkaji tentang Partai Gelora. Partai Gelora adalah sebuah partai baru yang nasionalis tetapi sebagian besar pendiri dan pengurus partai ini berasal dari Partai Keadilan Sejahtera yang bercorak Islam fundamentalis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana para mantan kader PKS bisa membentuk Partai Gelora yang berideologi nasionalis dan berbeda dengan PKS .

2.4. Kerangka Berpikir

Di Indonesia terdapat fenomena dimana berlomba-lombanya partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewadahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai. Ini merupakan sebuah fenomena menarik, ketika partai berbasis religius (Islam) dan merupakan partai doktriner, semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (disingkat Partai Gelora Indonesia) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019.

Partai Gelora adalah pecahan dari PKS, sebab sejumlah mantan politikus PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Anis Matta mengakui bahwa Partai Gelora terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera. Anis mengatakan dirinya sudah mengembangkan narasi keterbukaan partai sejak saat masih menjabat Sekjen maupun Presiden PKS. Anis Matta dan Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah pernah terlibat konflik di internal PKS. Konflik mencapai puncaknya ketika PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dan loyalis Anis Matta dari seluruh jenjang di PKS. Pengurus di daerah yang dikenal loyalis Anis Matta juga dipecat, seperti pimpinan DPW PKS di beberapa provinsi. Fahri Hamzah bersama Anis Matta kemudian mendirikan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), sebuah organisasi yang menjad cikal bakal berdirinya Partai Gelora.

Sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Meskipun sebagian besar kader Gelora dulunya kader PKS, Partai Gelora mengusung asas Pancasila berlandaskan UUD 1945, bukan Islam. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyatakan bahwa Partai Gelora akan menjadi partai yang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Partai Gelora akan membuka diri untuk seluruh komponen masyarakat. Karena itulah Partai Gelora disebutnya tidak ingin menasar target pemilih dari golongan tertentu.

Pada Pemilu 2019 PKS menduduki peringkat ke-5 di Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi perhatian bagi Partai Gelora dalam meraup suara di Sulawesi Selatan. Partai Gelora Sulawesi Selatan saat ini dipimpin oleh H. Syamsari Kitta, mantan Bupati Takalar 2017-2022 yang dahulu merupakan kader dari PKS. Di Sulawesi Selatan, sebagian besar mantan kader PKS di Sulawesi Selatan bergabung ke Gelora. Adapun kader itu adalah Syamsari Kitta, Asriadi Samad, Jafar Sodding, Taslim Tamang, Andi Abdullah Rahim, dan Mudzakkir Ali Djamil. Perpindahan kader PKS menjadi kader Partai Gelora menunjukkan ada perubahan dalam berpolitik dari partai Islam menjadi partai nasionalis. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun basis pendukung dan bagaimana para mantan tokoh PKS tersebut mempertahankan pendukung dari yang semula memilih partai Islam seperti PKS menjadi partai nasionalis seperti Gelora.

Perpindahan ini juga dilatarbelakangi oleh konflik internal dalam tubuh PKS antara para senior dan tokoh muda PKS saat itu yang bermula dari pemecatan Fahri Hamzah. Menariknya adalah karena PKS selama ini dikenal sebagai partai

yang cenderung menjalankan ideologi Islam yang puritan dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. Para kader yang telah lama dikenal bergabung di PKS seperti Anis Matta (mantan Presiden PKS), Fahri Hamzah (mantan Wakil Ketua DPR RI), dan sejumlah tokoh PKS yang utama di Sulawesi Selatan memutuskan untuk membangun Partai Gelora yang dikatakan lebih nasionalis dibandingkan dengan PKS. Dalam memposisikan ideologi partainya, tentu Partai Gelora melakukan cara-cara kepartaian untuk memperkenalkan diri sebagai partai baru yang nasionalis, sehingga hal inilah yang menarik untuk melihat bagaimana para mantan kader PKS membangun partai baru bernama Partai Gelora yang memiliki ideologi nasionalis.

2.4. Skema Pikir

